



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, provinsi, dan pusat.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, setidaknya terdapat tiga alasan Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024 yang meliputi :

1. Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD
2. Hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang perlu penyesuaian dalam penyelesaiannya
3. Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tahun 2020. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran. Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang ditindaklanjuti dengan Hasil Penajaman RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Nomor : 050/377/434.301/2022 tanggal 8 Agustus 2022, maka untuk menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah yang tercantum dalam Penajaman P-RPJMD tersebut dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah

berkewajiban melakukan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) yang selaras dan konsisten dengan P-RPJMD dimaksud.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen penjabaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Sampang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

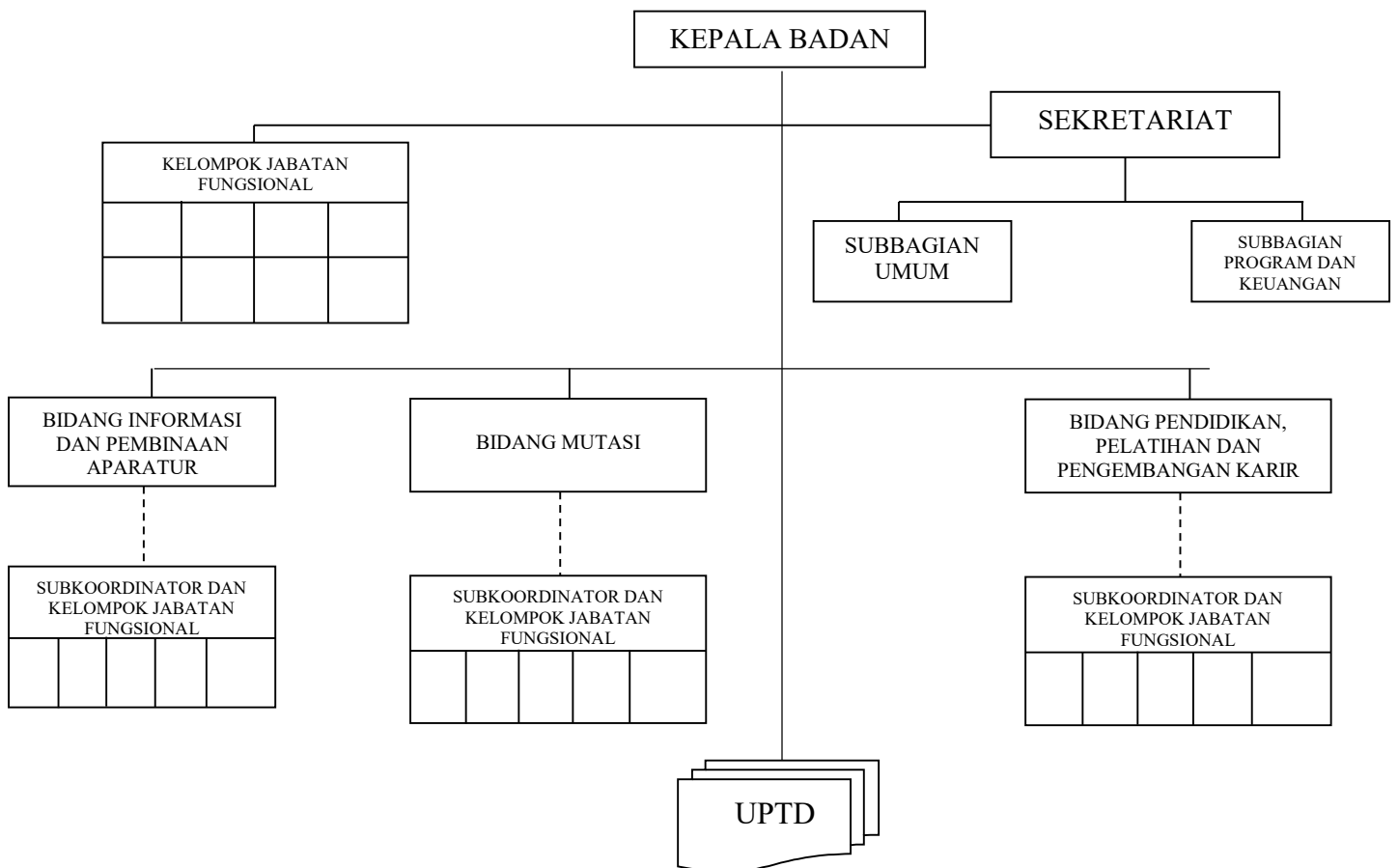
BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang perlu diganti sehingga ditetapkanlah Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sampang Berdasarkan Perbup Sampang Nomor 10 Tahun 2022



Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Mutasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional ;
- e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. UPTD Badan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dengan fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Perlengkapan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*"maintenance"*);
- m. Pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- n. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Sekretariat terdiri dari :

(1) **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan kemasyarakatan;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelengkapan, pengadaan, perawatan kelengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*"maintenance"*);
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) **Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. menyusun laporan penanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan sistem informasi, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, dengan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan formasi, pengadaan, sistem informasi dan pembinaan disiplin ASN;
- b. Pelaksanaan penerimaan ASN dan pendidikan kedinasan;

- c. Perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pembangunan, pengembangan sistem informasi manajemen ASN di lingkungan pemerintah kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembinaan formasi, pengadaan ASN, pengembangan sistem informasi dan penegakan disiplin ASN; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

3. BIDANG MUTASI

mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan dan menyusun petunjuk teknis administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pengangkatan pejabat, perpindahan antar kabupaten/provinsi, pemberian pensiun serta peningkatan kesejahteraan kepada pegawai, dengan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan serta penghimpunan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian baik jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
- b. Perencanaan dan penyelenggaraan mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
- c. Perencanaan dan penyelenggaraan seleksi jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi;
- d. Perencanaan dan penyelenggaraan kenaikan pangkat jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
- f. Penyelenggaraan dan penghimpunan pemberian pensiun bagi jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
- g. Perencanaan dan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur serta pengembangan karir, dengan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon ASN;
- c. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi dan penugasan tugas belajar pegawai;

- d. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi dan penugasan ijin belajar pegawai;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan karir;
- f. Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan aparatur serta pengembangan karier pegawai ASN;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

5. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- c. Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- d. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKPSDM Kabupaten Sampang harus didukung oleh sumber daya, baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Sampang didukung oleh pegawai sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, yang seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah data sumber daya aparatur BKPSDM Kabupaten Sampang berdasarkan beberapa klasifikasi, yaitu :

a. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang
Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Pembina Tingkat I / (IV/b)	0	0	0
	Pembina / (IV/a)	5	2	7
2.	Penata Tingkat I / (III/d)	2	2	4
	Penata / (III/c)	6	7	13
	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	1	4	5
	Penata Muda / (III/a)	1	1	2
	3.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	0
	Pengatur (II/c)	2	0	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	2
	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
TOTAL		20	17	37

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, Februari 2022

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang
Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	S-2	8	5	13
2.	S-1	7	11	18
3.	D-IV	0	0	0
4.	D-III	1	0	1
5.	D-II	0	0	0
6.	D-I	0	0	0
7.	SLTA	4	1	5
8.	SLTP	0	0	0
9.	SD	0	0	0
TOTAL		20	17	37

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, Februari 2022

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang
Berdasarkan Jabatan Menurut Jenis Kelamin

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Eselon II.b	1	0	1
2.	Eselon III.a	1	0	1
3.	Eselon III.b	2	1	3
4.	Eselon IV.a	1	1	2
5.	Fungsional	7	6	13
6.	Pelaksana	8	9	17
TOTAL		20	17	37

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, Februari 2022

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	20
2.	Perempuan	17
TOTAL		37

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, Februari 2022

Secara umum kondisi pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pegawai lulusan Sarjana merupakan jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 18 orang (48,65%). Selanjutnya, lulusan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 13 orang (35,14%). Dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

Sedangkan pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa pegawai dengan golongan ruang III merupakan golongan pegawai terbanyak, yaitu 24 orang (64,86%), golongan ruang IV sebanyak 7 orang (18,92%) dan golongan ruang II sebanyak 6 orang (16,22%). Hal ini menunjukkan bahwa struktur pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang jika dilihat dari aspek golongan ruang pegawai, tidak menunjukkan struktur piramida, melainkan menggelembung di tengah (yakni golongan ruang III sebesar 64,86%) yang dapat diasumsikan bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menjalankan fungsi manajemen SDM aparatur.

Demikian juga bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki (54,05%) dan perempuan (45,95%) pada tahun 2022 di BKPSDM Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa lebih

banyak pegawai laki-laki daripada perempuan tetapi angkanya masih proporsional dan berimbang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, BKPSDM Kabupaten Sampang juga didukung sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang manajemen kepegawaian. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kab. Sampang

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	TANAH				
	Tanah	1123 m ²	1123 m ²		
2.	PERALATAN DAN MESIN				
	Peralatan dan Mesin	557 unit	548 unit	6 unit	3 unit
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN				
	Gedung Kantor	1 unit	1 unit		
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
	Jaringan listrik (tambah daya)	1 paket	1 paket		
5.	ASET TETAP LAINNYA				
	Buku bacaan	3 paket	3 paket		
6.	KONSTRUKSI DALAM	-	-		
	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-		

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, Buku Inventaris Semester II Tahun 2021

Sarana dan prasarana di atas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang. Diharapkan pada akhir periode Renstra, sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No.	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
2.	66 ≤ 75	Sedang
3.	51 ≤ 65	Rendah
4.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang pada Renstra Tahun 2019-2024 dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN (%)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)				71	75	77	81	83	85	62,21	62,99	48,30*	81	83	85	87,62	83,99	62,73	100	100	100
a.	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi (%)				70	72	74	76	78	82	68,36	69,05	69,99	76	78	82	97,66	95,90	92,09	100	100	100
b.	Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal "baik" (%)				76	78	80	82	83	85	99,26	99,90	99,93	82	83	85	130,61	128,08	124,91	100	100	100

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Keterangan :

*) Realisasi IP ASN adalah nilai sementara IP ASN, untuk nilai resmi menunggu hasil rilis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang relatif tercapai dengan baik. Hal ini karena BKPSDM Kabupaten Sampang terus melakukan perbaikan kinerja pelayanan bidang layanan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Adapun hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja tujuan Renstra “Indeks Profesionalitas ASN”, realisasi kinerja tahun 2019-2021 tidak mencapai target, sehingga dengan capaian realisasi kinerja tersebut perlu adanya penyesuaian target kinerja mengikuti perkembangan realisasi selama 2019-2021.
2. Indikator kinerja sasaran Renstra “Persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi”, realisasi kinerja tahun 2019-2021 belum mencapai target, tetapi dengan sumber daya yang ada masih dapat diusahakan untuk pencapaian kinerjanya.
3. Indikator kinerja sasaran Renstra “Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal “baik”, realisasi melebihi target, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target.

Kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan sasaran/target indikator kinerja, juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang periode Renstra Tahun 2019-2024 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BELANJA	8,913,412,000.00	8,691,812,334.00	5,110,916,800.00	7,159,100,250.00	7,875,010,200.00	8,662,511,300.00	7,283,644,061.00	6,794,074,493.00	-	-	-	-	81.72	78.17	-	-	-	-	-2.49%	-6.72%
Belanja Tidak Langsung	3,606,211,500.00	4,442,184,576.00	-	-	-	-	3,320,081,780.00	3,169,446,509.00	-	-	-	-	92.07	71.35	-	-	-	-	23.18%	-4.54%
Belanja Langsung	5,307,200,500.00	4,249,627,758.00	5,110,916,800.00	7,159,100,250.00	7,875,010,200.00	8,662,511,300.00	3,963,562,281.00	3,624,627,984.00	-	-	-	-	74.68	85.29	-	-	-	-	-19.93%	-8.55%
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	599,559,000.00	683,389,308.00	855,000,000.00	917,000,000.00	985,000,000.00	1,025,000,000.00	569,635,445.00	644,257,223.00	-	-	-	-	95.01	94.27	-	-	-	-	13.98%	13.10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372,255,000.00	226,082,000.00	293,916,800.00	338,850,250.00	437,810,200.00	540,311,300.00	359,876,142.00	224,777,170.00	-	-	-	-	96.67	99.42	-	-	-	-	-39.27%	-37.54%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72,600,000.00	0,00	102,000,000.00	122,250,000.00	125,700,000.00	125,700,000.00	71,268,000.00	0,00	-	-	-	-	98.17	0.00	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	43,915,000.00	23,987,500.00	45,000,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	43,364,800.00	16,462,500.00	-	-	-	-	98.75	68.63	-	-	-	-	-45.38%	-62.04%
Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	1,491,484,500.00	1,518,178,930.00	1,480,000,000.00	1,657,500,000.00	1,870,000,000.00	2,045,000,000.00	850,964,361.00	1,488,384,888.00	-	-	-	-	57.05	98.04	-	-	-	-	1.79%	74.91%
Program Mutasi Kepegawaian	1,077,360,000.00	1,117,542,200.00	730,000,000.00	984,000,000.00	1,057,000,000.00	1,137,000,000.00	592,161,670.00	626,283,504.00	-	-	-	-	54.96	56.04	-	-	-	-	3.73%	5.76%
Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	1,650,027,000.00	680,447,820.00	2,460,000,000.00	3,090,000,000.00	3,350,000,000.00	3,740,000,000.00	1,476,291,863.00	624,462,699.00	-	-	-	-	89.47	91.77	-	-	-	-	-58.76%	-57.70%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun 2019-2020 relatif tercapai dengan baik. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. BKPSDM tidak memiliki pendapatan, karena tidak menyelenggarakan pendapatan dan tidak terlibat dalam pengelolaan segala pendapatan daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
- b. Pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019-2020 sebesar 23,18% dan realisasinya sebesar -4,54%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pegawai serta besaran gaji dan tunjangan PNS BKPSDM Kabupaten Sampang.
- c. Rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung yang merupakan jumlah total dari anggaran 7 (tujuh) program BKPSDM Kabupaten Sampang sebesar -19,93% dan realisasinya sebesar -8,55%. Pertumbuhan anggaran dan realisasi Belanja Langsung tahun 2019-2020 mengalami penurunan/negatif. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tahun 2020 sehingga dilakukan perubahan anggaran (*refocussing*) beberapa kali dalam rangka penanggulangan dan percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19.
- d. Pada tahun 2020 diimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat perubahan klasifikasi program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Sampang pada anggaran tahun 2021 dan selanjutnya. Perubahan tersebut termuat dalam pemetaan nomenklatur program dan kegiatan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi. Komparasi sasaran Renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Komparasi Sasaran Renstra Badan BKPSDM Kabupaten Sampang terhadap Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Kepegawaian Negara

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4
	<p>Tujuan : Meningkatnya SDM aparatur yang professional Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan ASN Indikator : Persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja ASN Indikator : Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal “baik”</p>	<p>Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur : 1. Meningkatkan kualitas penataan SDM aparatur 2. Meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3. Meningkatkan kualitas data pegawai ASN yang akurat 4. Meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur</p> <p>Sasaran Renstra BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 : 1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan 2. Meningkatkan sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional</p>	<p>Sasaran Renstra Kementerian PAN-RB Tahun 2020-2024 : 1. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas dan sejahtera</p> <p>Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 : 1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima 3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) 4. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN 5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.</p>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Renstra BPSDM Provinsi Jawa Timur, Renstra Kementerian PAN-RB dan Renstra Badan Kepegawaian Negara. Hal ini menunjukkan bahwa P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang yang mengacu pada P-RPJMD Kabupaten Sampang selaras dan telah sejalan dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga.

2.4.1 Hasil Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan

c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang.

2.4.2 Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, BKPSDM Kabupaten Sampang mendukung dalam pencapaian tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Tabel 2.10
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN 2024	Gap Capaian 2021 dengan Target RPJMN 2024	Keterangan	Perangkat Daerah
		2020	2021				
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
16.7.1.(b)	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	11,77%	8,69%	Meningkat	-	-	BKPSDM

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pendistribusian dan penataan aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan	Pendistribusian dan penataan aparatur sesuai dengan kompetensi belum optimal	<p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai - Uji Kompetensi belum diterapkan kepada semua pegawai <p>Faktor Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya komitmen stakeholders dalam penataan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			aparatur sesuai kompetensi - Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan untuk semua jabatan
2.	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur serta belum sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur belum sesuai Analisis Kebutuhan Diklat	Faktor Internal: - Keterbatasan SDM - Kurangnya kemauan dan kemampuan ASN untuk mengembangkan kompetensinya Faktor Eksternal: - Keterbatasan anggaran daerah untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan - Mahalnya biaya pendidikan dan pelatihan -
3.	Belum optimalnya penilaian kinerja secara obyektif	Penilaian kinerja aparatur belum dilaksanakan sesuai ketentuan Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja	Faktor Internal: - Belum optimalnya sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan - Kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas pokok dan fungsi Faktor Eksternal: - Perubahan regulasi terkait sistem penilaian kinerja
4.	Masih tingginya kasus pelanggaran disiplin aparatur	- Kurangnya pemahaman aparatur tentang disiplin - Kurangnya kesadaran/ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Faktor Internal: - Keterbatasan SDM Faktor Eksternal: - Kurangnya pengawasan melekat masing-masing perangkat daerah - Belum optimalnya penerapan kode etik dan perilaku ASN
5.	Kurang optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian belum optimal	Faktor Internal: - Keterbatasan SDM (tenaga IT) - Kualitas data pegawai masih kurang dan belum update Faktor eksternal : - Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional terhadap semua layanan kepegawaian

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Identifikasi permasalahan tersebut di atas digunakan untuk menentukan isu strategis BKPSDM Kabupaten Sampang. Selain itu, masing- masing kriteria masalah juga menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan, sehingga tercipta sinergitas antara masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sampang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut :

Visi:

“Sampang Hebat Bermartabat”

Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024



Dari visi-misi di atas, tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian **misi-4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Adapun tujuan misi ini adalah **Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik**. Pencapaian sasaran tersebut, BKPSDM Kabupaten Sampang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator sasaran **“”**. Program aksi yang tertuang dalam P-RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM yaitu Peningkatan kualitas ASN. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang yang dijabarkan pada tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2.
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No.	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi - 4 : “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Peningkatan kualitas ASN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendistribusian dan penataan aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan 2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur serta belum sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 3. Belum optimalnya penilaian kinerja secara obyektif 4. Masih tingginya kasus pelanggaran disiplin aparatur 5. Kurang optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan pemetaan jabatan 2. Keterbatasan SDM pada BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3. Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya 4. Belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi 5. Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian 6. Masih lemahnya pengawasan melekat/atasan langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM secara ideal 2. Adanya dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM 3. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan pelayanan

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada sub bab ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PAN - RB 2020-2024	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
					Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera	Meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai ASN	<p>Sasaran P-Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan ASN Meningkatnya kualitas sistem informasi layanan kepegawaian yang terintegrasi Meningkatnya Penataan ASN sesuai kompetensinya Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi dan manajemen karir ASN Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan serta perlindungan ASN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur <p>Sasaran Renstra BPSDM Provinsi Jawa Timur 2019-2024: Meningkatkan kompetensi aparatur setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pendistribusian dan penataan aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur serta belum sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat Belum optimalnya penilaian kinerja secara obyektif Masih tingginya kasus pelanggaran disiplin aparatur Kurang optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penerapan pemetaan jabatan Keterbatasan SDM pada BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya Belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian Masih lemahnya pengawasan melekat/ atasan langsung 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM secara ideal Adanya dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan pelayanan

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang. Namun demikian, dalam kaitan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang tidak bertentangan dengan Perda RTRW.

Demikian juga berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dari program-program tersebut tidak termasuk program yang berada di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Penempatan dan penataan aparatur sipil negara berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi belum sepenuhnya sesuai
- b. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumberdaya aparatur kepegawaian dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap aparatur sipil negara yang professional belum optimal
- c. Peningkatan fungsi pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin PNS belum optimal
- d. Pengembangan dan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian online berbasis teknologi informasi dalam rangka pemutakhiran data belum maksimal

- e. Pengembangan sistem informasi berbasis web yang menyajikan informasi dan pengajuan terkait pelayanan manajemen kepegawaian belum optimal untuk semua jenis pelayanan

Beberapa isu strategis tersebut dapat ditelaah lebih dalam dan dikaitkan pada isu pengarusutamaan gender. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya. Dalam analisa gender ini juga dilakukan proses identifikasi masalah terutama mengenai isu gender yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

BKPSDM Kabupaten Sampang setiap tahun melakukan analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender BKPSDM Kabupaten Sampang menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar BKPSDM Kabupaten Sampang dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa isu gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Sampang lebih umum pada kesenjangan kesempatan penerima manfaat antara pegawai laki-laki dan perempuan, namun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut karena BKPSDM Kabupaten Sampang dalam melaksanakan kegiatan selalu melibatkan peserta dari Perangkat Daerah lainnya, dimana penentuan peserta berasal usulan dari masing-masing Perangkat Daerah yang lebih dominan mengajukan peserta laki-laki daripada perempuan, seperti pengajuan kenaikan pangkat, penataan pegawai, *assessment*, dan pemberian penghargaan Satya Lencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, BKPSDM Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4 : “Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** dan mendukung **tujuan : “Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”** serta mendukung pada pencapaian **sasaran : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai BKPSDM Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	SATUAN	REALISASI			TARGET			Kondisi Akhir Renstra (2024)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tujuan :											
	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	56	nilai	62,21	62,99	48,30*)	81,00	83,00	85,00	85,00
					Perubahan target kinerja		63,77	64,54	71	71	71
Sasaran :											
1	Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	n/a	nilai	n/a	n/a	113	250	275	300	300
					Perubahan target kinerja		113	250	275	300	300

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategis, dimana IKU yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN ; dan
2. Indeks Sistem Merit

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Sampang

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	$IPP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $IP_1 = W_{1k} * R_{1j} \quad IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l} \quad IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$	- Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)	- Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur - Bidang Mutasi - Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir Aparatur
2.	Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit = \sum (Bobot sub aspek x Skor)	Laporan Hasil Penilaian Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara	- Sekretariat - Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur - Bidang Mutasi - Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir Aparatur

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 4.3
Target Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Sampang

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal Renstra (2018)	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir Renstra (2024)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	56	nilai	62,21	62,99	48,30*)	81,00	83,00	85,00	85
					Perubahan target kinerja		63,77	64,54	71	71	71
2.	Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	n/a	nilai	n/a	n/a	113	250	275	300	300
					Perubahan target kinerja		113	250	275	300	300

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Sampang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Strategi adalah langkah-langkah perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan BKPSDM haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya BKPSDM Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Visi : Sampang Hebat Bermartabat						
Misi 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi			
S.12	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.21	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN	Peningkatan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Aparatur pemerintah	BKPSDM

Sumber : Penajaman P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

<p>SW</p> <p>OT</p>	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan sumber daya aparatur BKPSDM Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian 2. Terjalannya koordinasi yang baik dengan lembaga pemerintah tingkat pusat maupun provinsi memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penilaian kinerja ASN secara obyektif 2. Kurang optimalnya pengelolaan informasi, data dan dokumentasi kepegawaian
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan informasi 2. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan formasi ASN sesuai kebutuhan dan standar kompetensi jabatan • Rekrutmen ASN secara terbuka, transparan, bebas KKN dan objektif untuk mendapatkan ASN yang berkualitas • Penataan ASN sesuai kebutuhan dan kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas data dan sistem informasi kepegawaian • Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi
<p><u>Ancaman / Threat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kontrol dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi pemerintahan 2. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN • Optimalisasi pengembangan karir ASN sesuai kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan disiplin, integritas, komitmen dan kinerja ASN

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Arah kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara	Penyusunan formasi ASN sesuai kebutuhan dan standar kompetensi jabatan	Penyusunan formasi ASN dengan melibatkan seluruh perangkat daerah
		Rekrutmen ASN secara terbuka, transparan, bebas KKN dan objektif untuk mendapatkan ASN yang berkualitas	Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon ASN dengan obyektif, transparan dan terbuka menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)
		Penataan ASN sesuai kebutuhan dan kompetensi	Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
			Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
		Pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN	Pemberian kesempatan kepada ASN untuk menempuh pendidikan formal sesuai ketentuan
			Penyelenggaraan dan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Fungsional, dll.
		Optimalisasi pengembangan karir ASN sesuai kompetensi	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
			Penyelenggaraan assessment / uji kompetensi
			Penyusunan <i>talent pool</i>
		Peningkatan kualitas data dan sistem informasi kepegawaian	Update data kepegawaian secara berkala
Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian	Integrasi sistem informasi database kepegawaian secara		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		berbasis teknologi informasi	elektronik terkait layanan kepegawaian yang terpadu
		Peningkatan disiplin, integritas, komitmen dan kinerja ASN	Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
			Penyelenggaraan penegakan disiplin, mulai pencegahan sampai dengan menindak tegas pelanggaran hukum dan disiplin aparatur
			Pengembangan absensi versi android

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel di atas, maka BKPSDM Kabupaten Sampang melakukan pengembangan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang meliputi sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi absensi pegawai secara elektronik **Si ASEP** berbasis smartphone
2. Implementasi **Klinik Bina ASN**
3. Penerapan sistem penilaian kinerja PNS melalui **Si MANJA**
4. Penerapan sistem informasi pengajuan administrasi kepegawaian secara elektronik **Si PAULINE**
5. Penerapan pengajuan Kenaikan Pangkat less paper melalui **e-Pangkat**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 diperlukan kebijakan operasional dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2019-2024.

Rencana program dan kegiatan P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Tahun 2019-2020 sesuai dengan program dan kegiatan pada Renstra (murni) Tahun 2019-2024; dan
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021-2024, merupakan program dan kegiatan perubahan pada P-Renstra Tahun 2019-2024 sebagai implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
		4.03.4.03.01.16.02.	Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	orang		456	46.644.600,00	405	13.601.500,00									861	60.246.100,00			
				Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	kali		1		0										1				
				Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	orang		60		30										90				
		4.03.4.03.01.16.03.	Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	orang	1576	1110	199.728.305,00	1350	95.027.000,00									2460	294.755.305,00			
				Jumlah Keputusan Pensiun yang diterbitkan	orang	229	253		265											518			
				Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	orang	1951	1976		1614											3590			
				Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	orang	100	26		112											138			
				Jumlah cuti yang diterbitkan	orang	100	131		5											136			
		4.03.4.03.01.17.	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	%	3	3,88	1.476.291.863,00		624.462.699,00									3,88	2.100.754.562,00			
		4.03.4.03.01.17.01.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjurangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	orang	0	73	841.206.359,00	151	434.129.640,00									224	1.275.335.999,00			
				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	orang	2	0		0										0				
				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	orang	9	0		0											0			
				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	orang	30	0		0											0			
		4.03.4.03.01.17.02.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	orang	62	80	230.598.088,00	30	86.990.000,00									110	317.588.088,00			
		4.03.4.03.01.17.03.	Penyusunan Pengembangan Karir ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	orang	39	80	404.487.416,00	0	103.343.059,00									80	507.830.475,00			
				Jumlah assesi yang mendapat feedback	assesi	0	0		0											0			
				Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	orang	99	46		50											96			
				Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	orang	4	10		8											18			
				Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN	orang	1	1		3											4			
				Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	%	0	0		100											100			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	unit kerja	0	42		0										42			
				Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	unit kerja	42	0		0										0			
				Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	jenis	6	4		0										4			
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	kegiatan	3	3		0										3			
				Jumlah penerbitan Media KORPRI	eksemplar	760	800		0										800			
	2. Meningkatnya kinerja ASN			Persentase ASN dengan nilai PPK minimal "baik"	%	74,89	99,26		99,90													
		4.03.4.03.01.15.	Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	Persentase data kepegawaian yang akurat	%	84,94	90,16	548.480.625,00	100	353.997.479,00										902.478.104,00		
				Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	%	99,58	99,51		99,74													
		4.03.4.03.01.15.03.	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	aplikasi	1	2	357.403.215,00	1	212.318.529,00									3	569.721.744,00		
				Jumlah data kepegawaian yang diupdate	orang	6946	6932		6694										13626			
				Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	dokumen	459	362		92										454			
		4.03.4.03.01.15.04.	Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah penelapan penjatihan hukuman disiplin pegawai yang diproses	kasus	29	34	191.077.410,00	14	141.678.950,00									48	332.756.360,00		
				Jumlah pelaksanaan sidang setelah Cuti Bersama	kali	1	1		0										1			
				Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	dokumen	72	81		73										154			
				Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	unit KORPRI	12	0		0										0			
				Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	orang	100	100		0										100			
	PENUNJANG (ADUM)							1.044.144.387,00		885.496.893,00												
		4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	569.635.445,00	100	644.257.223,00									200	1.213.892.668,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		4.03.4.03.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	surat	3789	3789	207.109.963,00	3560	332.127.399,00									7349	539.237.362,00		
				Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12										24			
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	23	23		24										47			
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	30	30		0										30			
				Jumlah tenaga kebersihan	orang bulan	60	60		48										108			
				Jumlah tenaga penjaga kantor	orang bulan	24	24		24										48			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	orang bulan	14	14		11										25			
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar	730	0		732										732			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	orang kali	473	0		549										549			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	orang kali	96	0		138										138			
		4.03.4.03.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis	60	68	220.479.680,00	56	184.063.550,00									124	404.543.230,00		
				Jumlah cetakan yang disediakan	jenis	17	8		7										15			
				Jumlah penggandaan	lembar	17500	52499		50180										102679			
				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	unit	18	18		13										31			
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	jenis bulan	730	730		0										730			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	orang kali	473	574		0										574			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	orang kali	96	96		0										96			
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	30	0		30										30			
		4.03.4.03.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	orang kali	15	18	142.045.802,00	19	128.066.274,00									37	270.112.076,00		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	orang kali	88	67		112										179			
		4.03.4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	99,37	99,19	359.876.142,00	99,29	224.777.170,00									198,48	584.653.312,00		
		4.03.4.03.01.02.01.	Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	0	0	234.943.000,00	0	59.130.000,00									0	294.073.000,00		
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1		1										2			
		4.03.4.03.01.02.03.	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	unit	0	0	31.529.142,00	0	27.521.170,00									0	59.050.312,00		
				Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	unit	0	0		0										0			
				Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	unit	4	4		4										8			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		4.03.4.03.01.02.04.	Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	24	12	93.404.000,00	91	138.126.000,00									103	231.530.000,00		
				Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	0	61		40										101			
				Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	0	0		0										0			
				Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	0	0		0										0			
				Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	unit		28		34										62			
		4.03.4.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	100	71.268.000,00	0	0,00									100	71.268.000,00		
		4.03.4.03.01.03.01.	Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi / Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti binteK/sosialisasi / seminar	orang kali	35	24	71.268.000,00	0	0,00									24			
		4.03.4.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik	%	100	100	43.364.800,00	100	16.462.500,00									200	59.827.300,00		
		4.03.4.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja yang disusun	dokumen	1	6	14.075.000,00	6	8.342.500,00									12	22.417.500,00		
		4.03.4.03.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA yang disusun	dokumen	3	4	14.289.800,00	3	8.120.000,00									7	22.409.800,00		
		4.03.4.03.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen SKM yang disusun	dokumen	1	1	15.000.000,00	1	0,00									2	15.000.000,00		
				Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	0	1		0										1			
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)												7.924.500.500,00		7.932.396.325,00		8.840.037.616,00		9.228.652.851,00		33.925.587.292,00		
Meningkatnya profesionalitas ASN				Indeks Profesionalitas ASN		56	62,21		62,99		63,77		64,54		71		71		71			
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN			Indeks Sistem Merit	n/a	n/a		n/a			113		250		275		300		300			
		5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
		5.03.	UNSUR KEPEGAWAIAN																			
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu							100	1.632.161.226,00	100	1.617.697.785,00	100	2.174.780.342,00	100	2.270.385.452,00	100	7.695.024.805,00		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	%						100	1.071.246.269,00	100	889.926.027,00	100	1.193.525.765,00	100	1.250.441.820,00	100	4.405.139.881,00		
				Persentase data ASN yang akurat	%						100		100		100		100		100			
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi yang disusun	dokumen						1	17.516.370,00	1	17.338.045,00		20.569.757,00		22.272.547,00	2	77.696.719,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Jumlah perpanjang/pemberhentian tenaga honorer daerah	orang						56		64						120			
				*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi yang terisi melalui Pengadaan PNS	formasi						76	802.737.149,00	250	629.215.232,00		822.750.917,00		852.860.953,00	326	3.107.564.251,00		
				Jumlah formasi yang terisi melalui Pengadaan PPPK	formasi						317		100						417			
				*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	orang						180	17.893.250,00	190	3.942.750,00		24.819.561,00		30.612.343,00	370	77.267.904,00		
				*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kasus hukum yang ditangani oleh LKBH KORPRI	kasus						0	14.625.000,00	0	14.835.000,00		75.073.763,00		73.011.740,00	0	177.545.503,00		
				Jumlah penerbitan Media KORPRI	eksemplar						200		200						400			
				Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	orang						0		0						0			
				Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	unit KORPRI						0		0						0			
				*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga										1		1		2			
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	aplikasi						1	155.843.000,00	1	160.848.500,00		175.083.782,00		191.687.133,00	2	683.462.415,00		
				*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	data						7000	62.631.500,00	7000	63.746.500,00		75.227.985,00		79.997.104,00	7000	281.603.089,00		
				*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian administrasi mutasi dan keangkatan	%						100	403.686.819,00	100	377.659.780,00	100	505.902.425,00	100	518.618.522,00	100	1.805.867.546,00		
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah administrasi mutasi yang diselesaikan	orang						500	52.462.000,00	250	10.083.675,00		35.083.675,00		38.487.022,00	750	136.116.372,00		
				Jumlah pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional yang diterbitkan	orang						200		200						400			
				*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen										1		1		2			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	orang						1550	59.068.919,00	1560	33.839.525,00		65.081.900,00		69.565.176,00	3110	460.642.501,00		
				Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	orang						1950		1952						3902			
				*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah JPT kosong yang terisi melalui Seleksi Terbuka JPT	jabatan						7	292.155.900,00	8	333.736.580,00	0	405.736.850,00	0	410.566.324,00	15	1.173.905.954,00		
				Jumlah pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional yang diterbitkan	orang						0		400		0		0		400			
				*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%						100	23.866.200,00	100	216.041.140,00	100	272.259.065,00	100	288.308.299,00	100	800.474.704,00		
		5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assessment/Uji Kompetensi	orang						0	14.127.500,00	50	190.033.940,00		225.500.940,00		245.275.987,00	50	674.938.367,00		
				Jumlah dokumen Talent Pool yang disusun	dokumen						1		1						2			
				Persentase ASN yang lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan/Ujian Dinas	%						0		0						0			
				*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Izin Belajar yang diterbitkan	orang						100	4.117.250,00	100	20.551.250,00		20.551.250,00		21.578.812,00	200	66.798.562,00		
				Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	orang						10		10						20			
				Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN	orang						0		0						0			
				*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang										100		100		200			
		5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN yang dilaksanakan	kali						1	5.020.450,00	1	4.888.450,00		24.316.875,00		19.453.500,00	2	53.679.275,00		
				*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah rapat koordinasi pembinaan jabatan fungsional ASN yang dilaksanakan	kali						1	601.000,00	1	567.500,00	0	1.890.000,00	0	2.000.000,00	2	5.068.500,00		
				*Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	orang										25		25		50			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	%						100	133.361.938,00	100	134.070.838,00	100	203.093.087,00	100	213.016.811,00		683.542.674,00		
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penilaian kinerja yang dilaksanakan	kali						1	3.773.338,00	1	4.513.338,00		40.605.587,00		44.429.811,00	2	93.322.074,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Jumlah laporan evaluasi kinerja ASN yang disusun	dokumen						1		1						2			
				*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen										1		1		2			
		5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya	orang						110	5.611.000,00	112	5.326.000,00		13.826.000,00		14.379.040,00	222	39.142.040,00		
				*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	orang										100		100		200			
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	dokumen						89	93.147.600,00	92	93.706.500,00		105.786.500,00		109.617.960,00	181	402.258.560,00		
				Persentase keputusan Izin Perceraian yang diselesaikan	%						0		100						100			
				*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang										20		20		40			
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN yang diselesaikan	%						100	30.555.000,00	100	30.525.000,00	0	42.875.000,00	0	44.590.000,00	200	148.545.000,00		
				*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	laporan										1		1		2			
		5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase keputusan Izin Perceraian yang diselesaikan	%						100	275.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	200	275.000,00		
				*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	dokumen										0		0		0			
		5.04.	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya							4,50	1.862.639.040,00	4,60	889.460.880,00	4,70	1.920.796.836,00	4,70	2.005.236.626,00	4,70	6.678.133.382,00		
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	%						0,00	8.430.000,00	0,00	0,00	100,00	278.558.740,00	100,00	292.486.677,00	100,00	579.475.417,00		
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	orang						0	8.430.000,00	0	0,00	0	278.558.740,00	0	292.486.677,00	0	579.475.417,00		
				*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang										60		60		120,00			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%						100,00	1.854.209.040,00	100,00	889.460.880,00	100,00	1.642.238.096,00	100,00	1.712.749.949,00	100,00	6.098.657.965,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
							-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Fungsional	orang						0	1.854.209.040,00	0	889.460.880,00		1.642.238.096,00		1.712.749.949,00	0	6.098.657.965,00		
				Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	orang						3		6						9			
				Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator	orang						2		6						8			
				Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	orang						0		0						0			
				Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan	orang						282		76						358			
				*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan									1			1		2			
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	4.429.700.234,00	100	5.425.237.660,00	100	4.744.460.438,00	100	4.953.030.773,00	100	19.552.429.105,00		
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%						100	18.056.975,00	100	22.787.425,00	100	24.155.325,00	100	24.155.325,00	100	89.155.050,00		
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen						3	1.977.735,00	3	3.183.985,00	0	3.189.385,00	0	3.189.385,00	6	11.540.490,00		
				*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen										3		3		6			
		5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen						1	4.301.485,00	1	5.071.485,00	0	5.071.485,00	0	5.071.485,00	2	19.515.940,00		
				*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen									1		1		2				
		5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen						2	2.766.191,00	1	4.038.490,00	0	4.038.490,00	0	4.038.490,00	3	14.881.661,00		
				*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen									1		1		2				
		5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen						1	2.201.188,00	1	2.218.490,00	0	2.218.490,00	0	2.218.490,00	2	8.856.658,00		
				*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen									1		1		2				
		5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPPA-SKPD yang disusun	dokumen						2	381.391,00	1	545.990,00	0	1.908.490,00	0	1.908.490,00	3	4.744.361,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen										1		1		2			
		5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen						5	6.428.985,00	5	7.728.985,00	0	7.728.985,00	0	7.728.985,00	10	29.615.940,00		
				*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen										5		5		10			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%						100	3.807.231.107,00	100	3.739.658.293,00	100	3.820.938.558,00	100	3.898.712.587,00	100	15.266.540.545,00		
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	orang						37	3.697.862.972,00	37	3.733.171.204,00	0	3.814.451.469,00	0	3.890.740.498,00	38	15.136.226.143,00		
				Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	orang/bulan						3		0		0		0		3			
				*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan										38		38		76			
		5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah silet tulis kantor yang disediakan	jenis						60	104.585.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	104.585.744,00		
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	dokumen						1	2.551.995,00	1	2.951.495,00	0	2.951.495,00	0	3.218.995,00	2	11.673.980,00		
				*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan										1		1		2			
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	dokumen						3	2.230.396,00	3	3.535.594,00	0	3.535.594,00	0	4.753.094,00	6	14.054.678,00		
				*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan										3		3		6			
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	%						0	0,00	100	9.984.000,00	100	36.098.000,00	100	51.856.000,00	100	97.938.000,00		
		5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	orang						0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
				Jumlah sosialisasi ketentuan bidang cukai yang dilaksanakan melalui media	media						0		0		0		0		0			
				Jumlah sosialisasi tatap muka ketentuan bidang cukai yang dilaksanakan	kali						0		0		0		0		0			
				*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang										0		0		0			
		5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	orang						0	0,00	2	9.984.000,00	0	36.098.000,00	0	51.856.000,00	2	97.938.000,00		
				*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang										4		5		9			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%						100	218.577.852,00	100	336.828.688,00	100	389.484.007,00	100	419.758.950,00	100	1.364.649.497,00		
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis						9	5.002.411,00	9	5.811.373,00	0	5.002.411,00	0	6.544.202,00	18	22.360.397,00		
				*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket										1		1		2			
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis						30	17.445.601,00	30	17.691.103,00	0	19.845.601,00	0	19.845.601,00	60	74.827.906,00		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit						42		60		0		0		102			
				*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket										1		1		2			
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis						0	0,00	60	109.428.772,00	0	107.823.905,00	0	107.823.905,00	60			
				*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket										1		1		2			
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis						12	65.398.600,00	8	56.536.000,00	0	62.411.050,00	0	65.531.602,00	20	249.877.252,00		
				Jumlah penggandaan yang disediakan	lembar						28000		35000		0		0		63000			
				*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket										2		2		4			
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar						1095	3.840.000,00	1095	3.840.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	2190	16.080.000,00		
				*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen										1		1		2			
		5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	orang kali						60	2.400.000,00	60	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	120	11.400.000,00		
				*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan										1		1		2			
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	orang kali						300	124.491.240,00	424	140.521.440,00		187.201.040,00		212.813.640,00	724	665.027.360,00		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	orang kali						13		28						41			
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	orang kali						51		55						106			
				*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan										1		1		2			
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%						100	100.000.000,00	100	319.993.858,00	100	102.557.889,00	100	155.277.911,00	100	677.829.658,00		
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit						1	100.000.000,00	56	319.993.858,00		102.557.889,00		155.277.911,00	57	677.829.658,00		
				*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit										25		30		55			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
							-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%						100	206.289.300,00	100	207.050.000,00	100	251.522.964,00	100	265.120.000,00	100	929.982.264,00		
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat						3200	60.000,00	3200	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00	6400	420.000,00		
				<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>laporan</i>									1		1			2			
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan						12	82.959.300,00	12	83.430.000,00		101.402.964,00		110.000.000,00	24	377.792.264,00		
				Jumlah kebutuhan listrik, air dan komunikasi	unit						4		4						8			
				<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>laporan</i>									1		1			2			
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan						12	123.270.000,00	12	123.500.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00	24	551.770.000,00		
				Jumlah tenaga kebersihan	orang bulan						48											
				Jumlah tenaga penjaga kantor	orang bulan						24											
				Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jenis								2							2		
				<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>laporan</i>									1		1			2			
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%						100	79.490.000,00	100	788.805.000,00	100	103.203.695,00	100	121.150.000,00	100	1.092.648.695,00		
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit						4	53.550.000,00	4	53.550.000,00	0	53.550.000,00	0	57.900.000,00	8	218.550.000,00		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit						23		23		0		0		46			
				<i>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>unit</i>									23		23			46			
		5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis						27	11.900.000,00	30	13.250.000,00		13.550.000,00		18.250.000,00	57	56.950.000,00		
				<i>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>unit</i>									25		25			50			
		5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit						1	14.040.000,00	1	722.005.000,00	0	36.103.695,00	0	45.000.000,00	2	817.148.695,00		
				Jumlah gedung kantor yang direhab	unit						0		0		0		0		0			
				<i>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>unit</i>									1		1			2			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%						100	55.000,00	100	130.396,00	100	16.500.000,00	100	17.000.000,00	100	33.685.396,00		
		5.03.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM yang disusun	dokumen						1	55.000,00	1	130.396,00		16.500.000,00		17.000.000,00	2	33.685.396,00		
				Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah	kali						0		0						0			
				*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan										1		1		2			

Keterangan :
Indikator sub kegiatan bertanda (*) adalah indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa P-Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan salah satu pendukung P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, karena BKPSDM merupakan salah satu perangkat daerah yang mengampu **misi-4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja BKPSDM yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran P-RPJMD tersebut.

Indikator kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Sampang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD 2019-2024

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Realisasi		Target				Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	56,00	56,90	60,01	62,01	64,01	70,01	70,01
S.12 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.21	Nilai SAKIP	56	64,99 (B)	66,13 (B)	70,01 (BB)	72,01 (BB)	74,01 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 7.2
Keterhubungan P-Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN P-RPJMD		TUJUAN P-RENSTRA BKPSDM		SASARAN P-RENSTRA BKPSDM		Kondisi Awal (2018)	REALISASI		TARGET				Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP						64,99 (B)	66,13 (B)	70,01 (BB)	72,01 (BB)	74,01 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
		Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN			56	62,21	62,99	63,77	64,54	71	71	71
				Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	n/a	n/a	n/a	113	250	275	300	300

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	REALISASI		TARGET P-RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	56	62,21	62,99	63,77	64,54	71	71	71

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra (P-Renstra) BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Dalam P-Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Oleh karenanya dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan program kerja hendaknya selalu diarahkan pada upaya pelaksanaan percepatan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Mengacu pada visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, BKPSDM Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang.

Kaidah Pelaksanaan

Dokumen P-Renstra ini dijadikan acuan BKPSDM Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 2019-2024. Semoga dokumen P-Renstra ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI



LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMETAAN ANTARA NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA-RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN NOMENKLATUR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019**

BKPSDM KAB. SAMPANG

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
BKPSDM	4.03.4.03.01.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5				
	4.03.4.03.01.15.			Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	- Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	100	%					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	- Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02		
					- Persentase data ASN yang akurat	100	%						- Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02		
					- Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	100	%						- Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02		
	4.03.4.03.01.15.01.			Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian	Jumlah dokumen formasi yang disusun	1	dokumen	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi yang disusun	Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen formasi yang disusun	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	01
					Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	56	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	01
	4.03.4.03.01.15.02.			Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	250	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	Administrasi Kepegawaian	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	01
					Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	100	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	Administrasi Kepegawaian	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	01
					Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	500	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	Administrasi Kepegawaian	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	01
	4.03.4.03.01.15.03.			Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	1	aplikasi (paket)	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,01	03
					Jumlah data kepegawaian yang diupdate	7000	orang	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,01	01
								Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,01	04
					Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	600	dokumen	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,01	04
					Jumlah fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	1	kali	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah Fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,03	02
	4.03.4.03.01.15.04.			Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	25	kasus	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	Pembinaan ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	01
								Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	Pembinaan ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	02
					Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	1	kali	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	Pembinaan ASN	Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	92	dokumen	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	Pembinaan ASN	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	01	
					Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	0	unit KORPRI	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,03	04	
					Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	100	orang	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,03	04	
	4.03.4.03.01.16.			Program Mutasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02			
	4.03.4.03.01.16.01.			Penataan Pegawai Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	1	kali	Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	02	
								Pengelolaan Mutasi ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	08	
								Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	09	
					Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	200	orang	Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	02	
								Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kependudukan	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	03	
					Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	3	kali	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	08	
	4.03.4.03.01.16.02.			Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	800	orang	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,01	02	
					Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	4	kali	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,01	02	
					Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	120	orang	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	Administrasi Kepegawaian	Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,03	09	
	4.03.4.03.01.16.03.			Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	1550	orang	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	09	
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	10	
					Jumlah Keputusan Pensiun yang diterbitkan	180	orang	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah Keputusan Pensiun yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Keputusan Pensiun yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	04	
								Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,02	05	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	1950	orang	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	Pembinaan ASN	Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	03	
					Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	110	orang	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	Pembinaan ASN	Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	03	
					Jumlah cuti yang diterbitkan	85	orang	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah cuti yang diterbitkan	Pembinaan ASN	Jumlah cuti yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2,05	03	
	4.03.4.03.01.17.			Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	6	%					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02			
	4.03.4.03.01.17.01.			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjurangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	12	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2,02	07	
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	0	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2,02	07	
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	5	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2,02	07	
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	40	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2,02	07	
	4.03.4.03.01.17.02.			Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	90	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2,02	07	
	4.03.4.03.01.17.03.			Penyusunan Pengembangan Karir ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	80	orang	Pengembangan Assessment Center	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	03	
					Jumlah asses yang mendapat feedback	80	asesi	Pengembangan Assessment Center	Jumlah asses yang mendapat feedback	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah asses yang mendapat feedback	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	03	
					Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	100	orang	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	01	
					Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	10	orang	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	01	
					Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN	5	orang														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	0	%	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Pengembangan Karir ASN	Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,04	02	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	42	unit kerja	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,04	02	
					Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	0	unit kerja	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,04	02	
					Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	10	jenis	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	04	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	3	kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	04	
					Jumlah penerbitan Media KORPRI	200	eksemplar	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah penerbitan Media KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah penerbitan Media KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2,03	04	
	4.03.4.03.01.01.				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01			
	4.03.4.03.01.01.01.				Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	3200	surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Administrasi Umum	Jumlah surat yang terkirim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	01	
					Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Administrasi Umum	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	02	
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	23	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	06	
					Jumlah tenaga kebersihan	48	orang bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah tenaga kebersihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	08	
					Jumlah tenaga penjaga kantor	24	orang bulan														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	14	orang bulan														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730	eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	15	
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	715	orang kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	17	
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	200	orang kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	17	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
	4.03.4.03.01.01.02.			Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	60	jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	10	
					Jumlah cetakan yang disediakan	7	jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah cetakan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	11	
					Jumlah penggandaan	37000	lembar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	11	
					Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18	jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	12	
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30	jenis		Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran								
	4.03.4.03.01.01.03.			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	39	orang kali														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	101	orang kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Administrasi Umum	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2,03	18	
	4.03.4.03.01.02.			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01			
	4.03.4.03.01.02.01.			Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	unit														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	28	
	4.03.4.03.01.02.03.			Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	0	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	20	
					Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	0	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	20	
					Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	4	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	30	
	4.03.4.03.01.02.04.			Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	15	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan peralatan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	24	
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	101	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	34	
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0	unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	22	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
					Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2,03	32		
					Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	33	unit															tidak ada sub kegiatan yang cocok
	4.03.4.03.01.03.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			5	03	01				
	4.03.4.03.01.03.01.			Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi / Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi / seminar	11	orang kali	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi / seminar	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi / seminar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			5	03	01	2,04	11		
	4.03.4.03.01.04.			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01				
	4.03.4.03.01.04.01.			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	6	dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2,02	06		
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2,02	07		
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2,02	09		
	4.03.4.03.01.04.02.			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	4	dokumen	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2,01	01		
	4.03.4.03.01.04.03.			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen SKM yang disusun	1	dokumen	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM yang disusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2,01	03		
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2	kali															tidak ada sub kegiatan yang cocok